

ABSTRAK

Di era globalisasi yang berkembang pesat teknologi di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu negara dimana berkembang tidaknya suatu negara dapat diukur dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini, maka cara berjudi pun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online (internet gambling), Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sebagaimana yang dilakukan terdakwa Wyner Tanoto. Dalam permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan ini adalah Pembuktian serta Penerapan hukum tindak pidana perjudian online ditinjau dari penerapan pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 560/Pdi.B/2016/Jkt.Utr. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji Pembuktian serta Penerapan hukum tindak pidana perjudian online ditinjau dari penerapan pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 560/Pdi.B/2016/Jkt.Utr sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara normatif dimana metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan dari pembahasan yang penulis sampaikan adalah Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat lagi dalam merumuskan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa dalam kasus perjudian khususnya yang menggunakan media elektronik setra perlu ada pertimbangan yang mendalam bagi Hakim dalam dalam memutuskan perkara seharusnya lebih bisa teliti dalam mempertimbangkan fakta – fakta yang ada didalam persidangan terutama terhadap alat bukti keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga peraturan yang sifatnya umum (lex generalis) apabila ada peraturan yang mengatur dan memiliki sifat yang lebih khusus (Lex Spesialis) maka seharusnya peraturan yang sifatnya lebih khusus tersebut digunakan untuk menjerat terdakwa agar terciptakan rasa keadilan.